

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo

by Veronica Sri Astuti

Submission date: 09-Jan-2023 01:56AM (UTC-0600)

Submission ID: 1990104740

File name: ar_Tradisional_dan_Penataan_Pasar_Modern_di_Kota_Probolinggo.pdf (440.8K)

Word count: 6159

Character count: 41409

**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN
PASAR MODERN DI KOTA PROBOLINGGO**
(Protection, Empowerment of Traditional Markets and Location Arrangement of Modern
Market Administration In The Probolinggo City)

Veronica Sri Astuti¹, Verto Septiandika²
Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan atas dasar keberadaan pasar modern akhir-akhir ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat. *Minimarket, Supermarket, Hypermarket* sangat mudah dijumpai di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat peritel kelas menengah dan bawah banyak yang mengeluh.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dalam Perda Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan pasar tradisional dan modern di Kota Probolinggo, telah melalui serangkaian proses oleh Badan Perizinan. Serangkaian proses dan faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan oleh Badan Perizinan adalah meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi/pelaksana, struktur birokrasi dan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yaitu keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket sangat tinggi, Badan Perizinan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut keberadaan usaha minimarket, ketidaksesuaian perda dengan kenyataan di lapangan, dan hambatan dalam internal yaitu menyatukan budaya kerja, mengumpulkan dan memahami peraturan dan membuat sistem administrasi.

Kata kunci: Pasar Tradisional, Pasar Modern

ABSTRACT

This research was conducted on the basis of the existence of modern markets lately to be the demands and consequences of a lifestyle that develops in society. Minimarkets, Supermarkets, Hypermarkets are very easy to find around our homes. These places promise a comfortable place at a price that is not less interesting, but behind that pleasure it turns out that middle and lower class retailers complain a lot.

This study aims to analyze the implementation of government policies in structuring traditional and modern markets in Regional Regulation Number. 9 of 2011 concerning Protection, Empowerment of Traditional Markets and Structuring Modern Markets in the City of Probolinggo and what factors influence the implementation of these policies.

The results of the study show that in the arrangement of traditional and modern markets in the City of Probolinggo, it has gone through a series of processes by the Licensing Agency. A series of processes and factors that are taken into consideration in the implementation of policies by the Licensing Agency include: communication, resources, disposition / implementation, bureaucratic structure and interests that influence policy.

Constraints, the desire of the community to establish a minimarket is very high. The Licensing Agency doesn't have strong authority to further regulate the existence of the minimarket business, the incompatibility of regional regulations with reality on the ground, and internal barriers, namely unifying work culture, gathering and understanding regulations and make an administrative system.

Keywords: Traditional Markets, Modern Markets

Pendahuluan

Seiring dengan era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Toko modern asing telah berdiri di Indonesia, bukan saja di pusat perkotaan, tetapi juga di pedesaan sehingga mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Sesuai yang tertera pada Perda menyatakan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* atau pun grosir yang berbentuk Perkulakan. (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor. 9 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 8).

Pasar Tradisional adalah "Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar". (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor. 9 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 5).

Pasar sebagai suatu sistem memiliki berbagai wajah yang selama ini sering saling mendahului baik dalam pemahaman konseptualnya maupun dalam konteks peletakannya sebagai suatu institusi. Secara konseptual, sistem pasar mengacu kepada mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang mengarah kepada nilai tambah yang paling efisien. Konsep ini lebih tepat ditujukan bagi istilah mekanisme pasar yang mendasarkan asumsi pada kesetaraan tawar-menawar, sebagai institusi pasar merupakan suatu bangunan sosial dari masyarakat yang menggabungkan lebih banyak variabel diluar permintaan dan penawar itu sendiri seperti ideologi, tujuan politik, adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. (Hamzah, 2011 : 219).

Berbeda dengan *Bouerdieu* dalam Hamzah, mengatakan bahwa pasar dan negara kini benar telah menemukan bentuknya. Keputusan kaum yang

terpinggirkan dari kegiatan ekonomi akibat pasar yang tak lagi berfungsi telah melahirkan reaksi-reaksi yang reaksioner. Sebenarnya menghadapkan negara dan pasar bukanlah suatu perbandingan yang seimbang. Pasar merupakan instrumen dinamis yang melahirkan keputusan pembentukan nilai tambah, sementara itu negara mengambil alih pembentukan dan pendistribusian nilai tambah melalui deskresi keputusan-keputusan rigid dan birokratis. Karena negara bukan pemain yang setara dengan pasar, negara seharusnya menjadi pelindung bagi institusi pasar dan seluruh pihak yang berkiprah di dalamnya. Didalam Negaralah pasar itu berada, jatuh bangunnya institusi pasar dalam suatu negara merupakan jalan pembuka bagi kekuatan maupun kelemahan negara itu sendiri. (Hamzah : 240-241).

Pasar modern berbeda dengan pasar tradisional, dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melihat harga pada label yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya secara mandiri (Swalayan) atau dilayani oleh Pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan-bahan makanan seperti sayur, daging dan buah-buahan, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang tahan lama. Contoh dari pasar moderna dalah Swalayan, *Supermarket*, *Hypermarket*, dan *Minimarket*.

Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan pasar ini modern akhir-akhir ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan tapi sudah merambah di kota-kota kecil yang ada negara ini, sangatlah mudah menjumpai *Minimarket*, *Supermarket*, *Hypermarket* di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat peritel kelas menengah dan bawah banyak yang mengeluh.

Minimarket-minimarket yang ada di Kota Probolinggo saling berlomba-lomba untuk memberikan kelengkapan dan ketersediaan produk yang dijual, kualitas produk yang dijual, kesan terdapat produk-produk import, kesan terdapatnya produk-produk yang baru

dipromosikan, kondisi harga dibandingkan dengan *Minimarket* atau pasar disekitarnya, potongan harga (*discount*) yang diberikan, terdapatnya paket-paket khusus dengan harga khusus, letak yang strategis, suasana didalam Swalayan, kebersihan ruangan, penataan dan pengelompokan produk, program promosi yang diselenggarakan, promosi di media cetak dan *elektronik*, adanya acara lomba dan permainan dan hiburan, hadiah atau undian yang diberikan, area parkir yang tersedia, keramahan pelayanan (kasir, pelayan toko dan lain-lain), dan adanya papan petunjuk harga untuk memudahkan dalam mencari produk sehingga membuat para konsumen beralih dari pasar tradisional ke *Minimarket* dan Swalayan.

Berbeda dengan *Minimarket*, pasar tradisional di Probolinggo yang lebih dulu ada dibandingkan *Minimarket* dan Swalayan yang sekarang ada secara tidak langsung merasakan dampak dari kehadiran *Minimarket* dan Swalayan. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pasar kini beralih memilih belanja di *Minimarket* maupun Swalayan dengan alasan lebih lengkap dan nyaman atau sekedar melihat-lihat, meskipun sebenarnya produk-produk yang ada di *Minimarket* atau Swalayan pun tersedia di pasar baru tersebut. Selain itu ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini juga mulai terbatas, kalau selama ini pasar tradisional dianggap unggul dalam memberikan harga relatif rendah untuk banyak komoditas. Dengan fasilitas belanja yang jauh lebih baik skala ekonomis pengecer modern yang cukup luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya pedagang pasar tradisional, mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang tradisional pun kini mulai terkikis. Keunggulan pasar tradisional selama ini adalah dari lokasi, karena masyarakat lebih senang berbelanja kepasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan seperti *Minimarket* terus berkembang memburu

lokasi yang potensial, dengan semakin marak dan terbarnya lokasi *minimarket* maka keunggulan lokasi pasar tradisional juga akan hilang, kedekatan lokasi kini tidak dapat lagi dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk membantu pedagang pasar tradisional agar dapat bersaing dengan *Minimarket* dan Swalayan agar keberadaanya tidak tersingkirkan.

Seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor. 9 Tahun 2011 Pasal 8 yang menyatakan bahwa lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang Kota Probolinggo termasuk peraturan zonasinya, memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan, serta memperhatikan jarak dari pasar tradisioanal, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisioanal. Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m, sehingga dengan penataan tersebut pasar tradisional dan pasar modern berada pada posisi yang sama-sama menguntungkan.

Berdasarkan dari kondisi objektif tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pasar Tradisional dan Modern di Kota Probolinggo". Penelitian ini merupakan studi tata ruang di Kota Probolinggo dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan penataan Pasar Modern).

Berdasarkan latar belakang di atas agar pembahasan dan pemecahan masalah tidak menyimpang maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo?

Implementasi Kebijakan

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalsasikan atau penyelenggaraan, aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, ketetapan, dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat). Maka dari itu, implementasi akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan (Wahab, 2016 : 133).

Van Meter dan Van Horn seperti yang dikutip *Leo Agustino*, memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (*Agustino, 2008 : 139*).

Menurut *Riant Nugroho* implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivasi atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (*Nugroho, 2008 : 432*).

Lester dan Stewart yang dikutip oleh *Winarno*, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan". (*Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102*).

Jadi definisi diatas, menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

a. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan (*top down*) dan (*bottom up*). Dalam bahasa *Lester dan Stewart* dalam *Leo Agustino* istilah itu dinamakan dengan "*the command and control approach*" (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (*Agustino, 2006 : 140*).

1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurutnya ada terdapat lima variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan yaitu :

- a) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
- b) Sumber-sumber kebijakan.
- c) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana.
- d) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksan.
- e) Sikap para pelaksana.
- f) Lingkungan ekonomi, dan politik. (Wahab, 2016 : 165).

2) Model Goerge C. Edward III

Beberapa ilmuwan penganut aliran *Top Down* salah satunya adalah *George C. Edward III*. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan nya menamakan model implementasi kebijakan publik dengan (*Direct and Indirect Impact On Implementation*), dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi (Suharno, 2013 : 170).

3) Model Grindle

Menurut Grindle dalam Rachman (2015:37) sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Variabel isi kebijakan menyangkut :

- a. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang digunakan.

Variabel lingkungan kebijakan menyangkut :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategiyang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok.

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam implementasi kebijakan penataan minimarket ini mengandung unsur banyaknya aparat yang terlibat dan adanya faktor isi kebijakan yang mempengaruhi kepentingan maka dalam penelitian ini mengkolaborasi pendapat dari Edward III dan Grindle dengan faktor-faktor sebagai berikut : struktur birokrasi, sumberdaya, komunikasi, disposisi/pelaksana, kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kolaborasi pendapat dari Edward III dan Grindle menunjukkan lima variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implentasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang di maksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui cetak ataupun media elektronik.

b. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata.

c. Disposisi / Pelaksana

Disposisi yang dimaksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen,

kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mendapatkan kebijakan dengan baik sebagaimana yang di harapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Oprasional Prosedur* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implentor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan (Suharno, 2013:170-171).

e. Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Setiap implementasi kebijakan publik dapat berhasil mencapai tujuannya bila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Atau dapat juga dikatakan bahwa kelompok kepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kesamaan sikap, sifat, kepercayaan yang bersatu membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Probo-linggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pena-taan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kota Probolinggo, liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas di antara pelaku ekonomi di sector perdagangan.

Perkembangan dan fenomena pasar modern di Kota Probolinggo baik yang berskala minimarket maupun supermarket telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya hypermarket-hypermarket yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang pasar modern secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli.

Pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan pasar modern sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007

khususnya Bab IV pasal 12 mengenai perizinan, adalah kewenangan yang sangat strategis terutama dalam hal penataan dan pengendalian pasar tradisional dan pasar modern. Bahkan dalam pasal 2 dan pasal 3 telah disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/termasuk zonasinya.

Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pembedayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, Pasal 8, ayat 1, menyebutkan bahwa, "Dalam rangka penataan pasar modern, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, termasuk pengaturan zonasinya;
- b. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c. Memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional.
- d. Pasar modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 m;

Pendirian pasar modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan data primer, di mana data diperoleh dari hasil observasi langsung obyek yang diteliti dan dari wawancara dengan pihak terkait, yaitu pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMP), UPTD Pasar, dan para pedagang, serta konsumen.

Oleh karena itu, analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (Sugiono, 2015). Analisis interaktif meliputi tahapan pengumpulan

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Proses implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern.

a) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang di maksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui cetak ataupun media elektronik. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa proses komunikasi yang dilaksanakan oleh BPMP yaitu dengan cara:

- 1) Sosialisasi baik dari media cetak/elektronik.
- 2) Sosialisasi yang terjun langsung ke lokasi/penyuluhan.
- 3) Pelayanan mobil keliling perizinan.
- 4) Pelayanan melalui telepon, sms, email dan website.
- 5) Komunikasi secara formal dan informal.
- 6) Koordinasi antar organisasi dan pejabat-pejabat terkait, dan
- 7) Koordinasi antar sub-sub bagian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMP) telah mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan oleh Pemerintah daerah. Maka dari itu komunikasi ini bertujuan agar mereka juga mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan. Sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin serta tepat sasaran.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa proses sumber daya yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP) yaitu :

- 1) Sumber daya yang terampil.
- 2) Sumber daya yang cerdas, memahami tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sumber daya yang mempunyai fisik yang baik dan terlatih.
- 4) Sumber daya non manusia seperti, fasilitas sarana dan prasarana.
- 5) Adanya pelatihan-pelatihan, seperti sipadu, pelatihan operator web oleh Diskominfo, pelatihan SIPO, HO, SIUP, Izin Pelatihan,
- 6) Adanya rapat-rapat rutin. (Apel)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses sumber daya yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP), sudah sesuai (SOP) yang ada, mulai dari pelatihan-pelatihan yang diberikan seperti; pelatihan SIPADU, pelatihan Operator Web, pelatihan SIPO, HO, SIUP, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Dan juga dari segi fasilitas sarana dan prasarana di Badan Perizinan di Kota Probolinggo sudah memadai.

c) Disposisi/Pelaksana

Disposisi/Pelaksana yang di maksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu

variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mendapatkan kebijakan dengan baik sebagaimana yang di harapkan oleh pembuat kebijakan.

Dari data yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa proses disposisi/pelaksana yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP) yaitu :

- 1) Pelaksana yang mempunyai kejujuran dan transparan.
- 2) Pelaksana yang berkomitmen dan bertanggung jawab.
- 3) Sifat/watak yang demokratis dan profesional.
- 4) Pelaksana yang paham, cepat, dan mudah Sesuai aturan dan SOP yang ada.
- 5) Pelaksana yang tegas, baik dan ramah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses disposisi/pelaksana yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP), sudah sesuai dengan Standart Operasional Presedur (SOP) dengan sangat baik, yang mempunyai watak kejujuran, berkomitmen dan tanggung jawab, karena baik atau buruknya sebuah kebijakan terletak pada sifat/karakteristik dari pembuat kebijakan itu sendiri. Selain itu juga, implementor/ pelaksana harus mempunyai pemahaman dan ketegasan tentang apa yang di implementasikan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur oprasional yang standar (*Standard Oprasional Prosedur* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman oprasional bagi setiap implentor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disajikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa proses struktur birokrasi yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP) yaitu :

- 1) Memiliki pedoman Standard Operasional Prosedur (SOP) yang memadai yang dimiliki oleh setiap implementor.
- 2) Tersusun atas beberapa sub bidang bagian.
- 3) Terdapat pembagian kewenangan antar unit-unit organisasi.
- 4) Pola organisasi dari atas kebawah.
- 5) Terhubung dengan rantai komando langsung dari Kepala Badan Perizinan (BPMPP).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses struktur birokrasi yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP), sudah sesuai dengan Standart Operasional Pusedur (SOP) dengan baik, melalui pembagian tugas dan kewenangan dari setiap sub bidang bagian yang ada di Badan Perizin di Kota Probolinggo. Didalam Badan Perizinan ini juga memiliki pola koordinasi yang baik dari atas kebawah yang dipimpin oleh Kepala Badan Perizinan langsung, sehingga sangat mudah dalam Pengawasannya.

e) **Kepentingan Yang Mempengaruhi Kebijakan**
Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (*interest affected*) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Ada beberapa proses kepentingan yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Adanya investor yang akan membangun minimarket
- 2) Proses perijinan yang panjang
- 3) Wewenang dari instansi yang terkait
- 4) Dampak positif dan negatif yang diberikan

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penataan pasar tradisional dan modern.

a) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang di maksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui cetak ataupun media elektronik. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa ada beberapa faktor komunikasi yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Faktor internal dan eksternal di Badan Perizinan.
- 2) Faktor pemahaman dalam berkomunikasi.
- 3) Faktor individu para implementor.
- 4) Sosialisasi yang tepat sasaran dan mudah di mengerti.
- 5) Informasi yang jelas dan *ter update*.

Faktor komunikasi internal dan eksternal merupakan faktor yang sering terjadi, jika para implementor kurang pemahaman berkomunikasi dengan rekan kerja, rekan organisasi, akan menimbulkan kesalah pahaman antar pembuat kebijakan dengan pengguna kebijakan/masyarakat. Selain itu, individu para implementor harus mempunyai pemahaman informasi yang cukup jelas agar sosialisasi baik yang media elektronik, media cetak dan di lapangan sesuai sasaran, dan mudah dimengerti.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor.

Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa faktor sumber daya yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Sumber daya yang memadai.
- 2) Sumber daya yang terampil, berkomitmen, dan tanggung jawab.
- 3) Sumber daya yang jujur dan baik, serta dari segi fisik, performa yang terampil dalam berkomunikasi.
- 4) Fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor sumber daya merupakan faktor yang paling utama dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, sehingga para pembuat kebijakan harus/wajib memiliki watak kejujuran/transparan, berkomitmen, tanggung jawab, terampil dalam semua bidang, terampil dalam berkomunikasi serta fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana. Maka dari itu, tanpa sumber daya yang memadai sebuah kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen diatas kertas semata dan tidak sesuai harapan.

c) Disposisi/Pelaksana

Disposisi/Pelaksana yang di maksud disini adalah menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokratis dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan mendapatkan kebijakan dengan

baik sebagaimana yang di harapkan oleh pembuat kebijakan. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa faktor disposisi/pelaksana yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Watak dan karakteristik dari pelaksana.
- 2) Kedisiplinan dan keterampilan.
- 3) Rasa tanggung jawab pelaksana.
- 4) Pemahaman, kecerdasan, dan transparan.
- 5) Komitmen, dan sifat demokratis para implementor.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa selain faktor komunikasi dan sumber daya, faktor disposisi/pelaksana juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Maka dari itu, disposisi/pelaksana juga merupakan variabel terpenting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yang mengenai watak dan karakteristik implementor itu sendiri. Selain itu, komitmen, pemahaman, kecerdasan dan sifat demokratis implementor serta rasa tanggung jawab pelaksana wajib dimiliki, agar kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Oprasional Prosedur* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan. Selain itu, struktur organisasi birokrasi juga harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta tentunya untuk memudahkan pengawasan. (Suharno, 2013 : 170-171).

Dari data yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa faktor komunikasi yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan yaitu :

- 1) Struktur organisasi yang jelas.
- 2) Struktur organisasi yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Pedoman SOP yang dimiliki setiap implementor.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa selain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/pelaksana-na, faktor struktur birokrasi juga merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Maka dari itu, didalam sebuah birokrasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui SOP yang dimiliki oleh setiap implementor. Agar pembagian kewenangan serta hubungan antar unit-unit organisasi didalam sebuah struktur birokrasi berjalan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

e) Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan

Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (*interest affected*) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Berdasarkan data yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa ada beberapa faktor kepentingan yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Keinginan yang tinggi
- 2) Dukungan dari berbagai pihak
- 3) Membuka lapangan kerja
- 4) Menambah pajak daerah
- 5) Membentuk kemitraan bagi UMKM

3. Kendala dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Dalam mengimplementasikan kebijakan dalam Penataan Pasar Tradisional dan Modern terdapat beberapa kendala yang dihadapi, meliputi:

- a) Keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket sangat tinggi.
Keuntungan yang ditawarkan dari usaha minimarket mendorong tingginya minat untuk

mendirikan usaha tersebut. Sehingga di Kota Probolinggo terdapat indikasi beberapa minimarket yang melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya minimarket yang ada.

- b) Badan perizinan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut keberadaan usaha minimarket.

Badan perizinan hanya sebatas memberikan ijin, namun tidak berwenang untuk melakukan penataan minimarket.

- c) Ketidaksesuaian perda dengan kenyataan di lapangan.

Mengingat pasar modern berada dekat dengan pasar tradisional. Menurut Pasal 10 mengenai jam operasional. Jam operasional untuk pasar modern (minimarket) dimulai setelah pasar tradisional tutup. Namun pada kenyataan masih ada beberapa minimarket yang beroperasi selama 24 jam.

- d) Secara internal, dalam Badan Perizinan terdapat beberapa hambatan, meliputi:

- 1) Hambatan dalam menyatukan budaya kerja masing-masing personil yang telah memiliki budaya kerja yang telah terbentuk dari instansi sebelumnya.
- 2) Hambatan dalam meningkatkan pengetahuan personil terhadap pemahaman semua perizinan.
- 3) Hambatan dalam mengumpulkan dan memahami peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perizinan yang sangat beranekaragam.
- 4) Hambatan dalam membuat sistem administrasi yang praktis dari berbagai macam layanan perizinan.

Kesimpulan

Penataan pasar tradisional dan modern di Kota Probolinggo, telah melalui serangkaian proses oleh Badan Perizinan. Serangkaian proses dan faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan oleh Badan Perizinan adalah meliputi:

1. Komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Perizinan (BPMPP) sudah baik, telah mengikuti Standart Operasional Prosedur yang ada dilihat

dari adanya koordinasi dari Kepala Badan sampai ke petugas survei, dari birokrat ke pelaku usaha. Komunikasi ini bertujuan agar mereka juga mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan.

2. Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor yang paling utama dalam implementasi sebuah kebijakan, sehingga para pembuat kebijakan harus/wajib memiliki watak kejujuran/transparan, berkomitmen, tanggung jawab, terampil dalam semua bidang, terampil dalam berkomunikasi serta fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yaitu pelatihan SIPADU, pelatihan operator web, pelatihan SIPO, HO, SIUP dan mobil pelayanan keliling.

3. Disposisi/Pelaksana

Sudah memadai, disposisi/pelaksana juga merupakan variabel terpenting dalam implementasi sebuah kebijakan, yang mengenai watak dan karakteristik implementor itu sendiri. Komitmen, pemahaman, kecerdasan dan sifat demokratis implementor serta rasa tanggung jawab pelaksana wajib dimiliki, agar kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Lembaga yang menangani ijin pendirian ada tiga instansi pemerintah, hal ini tidak efisien. Maka dari itu, didalam sebuah birokrasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui SOP yang dimiliki oleh setiap implementor. Agar pembagian kewenangan serta hubungan antar unit-unit organisasi didalam sebuah struktur birokrasi berjalan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan Pihak yang berkepentingan dengan peraturan tersebut berpotensi mempengaruhi implementasinya adalah investor itu sendiri.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, meliputi:

1. Keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket sangat tinggi.

2. Badan perizinan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut keberadaan usaha minimarket, karena adanya pasal-pasal yang tidak selaras satu pasal dengan pasal yang lain.

3. Ketidaksesuaian perda dengan kenyataan di lapangan.

4. Hambatan dalam internal yaitu menyatukan budaya kerja, mengumpulkan dan memahami peraturan dan membuat sistem administrasi.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

a. Menggandeng investor lokal maupun nasional dalam mengembangkan pasar tradisional.

b. Meningkatkan sumberdaya staf pada Badan Perizinan (BPMPP) Badan ini merupakan *leading sector* dalam pelaksana kebijakan penataan minimarket di Kota Probolinggo.

c. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan harus lebih ditegakkan dan para pelaksana terutama Badan Perizinan harus lebih mempunyai keberanian agar menimbulkan efek jera kepada minimarket yang lain yang ingin melakukan pelanggaran. Selain pelanggaran itu perlu ditingkatkannya komunikasi antar instansi dalam hal pelaksanaan/pemberian sanksi.

d. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Probolinggo untuk memperjelas kewenangan para pelaksana kebijakan penataan minimarket di Kota Probolinggo ini terutama dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

e. Bagi pengelola pasar :

1) Perlunya kreatifitas dari setiap UPT agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar tradisional.

2) Dinas pengelola pasar setidaknya mempunyai *software* yang dapat memudahkan konsumen untuk melihat daftar harga barang di pasar tanpa ke lokasi langsung.

2. Bagi masyarakat

Bagi para konsumen supaya berbelanja di pasar tradisional selain mendukung perekonomian

usaha masyarakat kalangan kecil menengah dan membantu pelestarian kelangsungan pasar tradisional.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang berminat mengkaji permasalahan lebih dalam, perlu memastikan adanya petunjuk teknis (Juknis), untuk petugas survei dan petugas monev atas peraturan-peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pancur Siwah.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA.
- Edward III, Goerge C. 1980. *Implementating Public Policy*. Washington : Congressional Quartelly Press.
- Hamzah, Fahri. 2011. *Negara Pasar Dan Rakyat*. Yayasan Faham Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meter, Donald S. Van Dan Carl E. Vanhorn. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*. Ohio: State University.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Karya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Tangkilsan, Hesel Nogi. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Ombak.
- Santosa, Panji, M, Si. 2012. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Wahab, Abdul, M.A. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Publik, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo.

B. Website :

<http://.digilib.uinsby.ac.id/eprint/10564>

<http://.eprint.ums.ac.id/view/divisions/R100/150316/13:20>

<http://.dispobpar.probolinggo.go.id/indek.pdf.160216/15:30>

C. Jurnal

Anis Sumaira. (2014). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Klaten*. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Erna Anna Mazidah. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional*. Kabupaten Lamongan: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

D. Peraturan Daerah

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.

Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
